



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



H. SAHRUJANI
BUPATI HULU SUNGAI UTARA



HERO SETIAWAN
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA



KATA PENGANTAR



H. SAHRUJANI
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, Kerabat, Pengikut Beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir nanti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara ini merupakan media pertangungjawaban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan urusan dan kewenanganNya. Laporan ini berisi informasi tentang uraian pertangungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pencapaian misi dan agenda pembangunan daerah yang dijabarkan melalui program-program pembangunan. Laporan ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama semua pihak yakni aparat pemerintah daerah, masyarakat dan swasta baik dalam perumusan kebijakan, implementasi serta pengawasan.

Akhirnya kami berharap LKjIP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, agar kedepan dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien serta akuntabel.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Amuntai 26 Maret 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

H. SAHRUJANI



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 5 Amuntai Kode Pos 71414, Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. (0527) 62002 Fax. (0527) 6060003, e-mail : inspektorat.kab.hsu@gmail.com
Website : www.inspektorat.hulusungaiutarakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Amuntai, 25 Maret 2025





IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada pencapaian Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Capaian pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasarkan target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya, serta membandingkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan ini menyajikan uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja utama.

Hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 nilai rerata sebesar 113,87 dengan predikat "Sangat Berhasil". Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang pelaksanaannya didukung dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan, hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai terhadap 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diperoleh data sebagai berikut :

- a. 6 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (66,67%) tercapai dengan kategori "Sangat Berhasil".
- b. 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (22,22%) tercapai dengan kategori "Berhasil".
- c. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (11,11%) tercapai dengan kategori "Cukup Berhasil".

Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama belum berhasil mencapai target yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan analisis tingkat capaian indikator tujuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan penyerapan anggaran pada setiap indikatornya, terdapat 2 (dua) indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Tingkat Pengangguran Terbuka, karena indikator kinerja dapat dicapai 100% atau lebih, persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prestasi kinerja yang telah berhasil diraih merupakan kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama stakeholder, dengan semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sedangkan kekurangan yang ada, merupakan semangat pemacu untuk perbaikan di tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. ORGANISASI PEMERINTAHAN.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
A. PERENCANAAN	5
1. VISI.....	5
2. MISI	5
3. TUJUAN DAN SASARAN	6
B. PERJANJIAN KINERJA	9
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN.....	14
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	36
1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	36
2. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja ..	38
3. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	42
4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa.	44
BAB IV PENUTUP	45
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA.....	45
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS	47

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Jumlah Indikator Perkelompok Tujuan dan Sasaran	7
Tabel 2. 2 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026	7
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Tahun 2023	10
Tabel 2. 4 Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	11
Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja	13
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	13
Tabel 3. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	14
Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 1	15
Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2	17
Tabel 3. 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten HSU Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023.....	18
Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 3	20
Tabel 3. 8 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten HSU Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 - 2023.....	21
Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 4	22
Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 5	24
Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 6	27
Tabel 3. 12 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 7	31
Tabel 3. 13 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 8	32
Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 9	34
Tabel 3. 15 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK RI)	37
Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	38
Tabel 3. 17 Efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.	39
Tabel 3. 18 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.....	40
Tabel 4. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	45



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Capaian IPM Kabupaten HSU Tahun 2017-2023 dibandingkan Provinsi Kalsel dan Nasional	15
Grafik 3. 2 Capaian IPM Kabupaten HSU, Kabupaten Sekitar dan Prop. Kalsel Tahun 2023	16
Grafik 3. 3 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten HSU Tahun 2023	18
Grafik 3. 4 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Kabupaten Tetangga dan Prop. Kalsel Tahun 2023 Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
Grafik 3. 5 Capaian PDRB perkapita ADHB Kabupaten HSU Tahun 2023	20
Grafik 3. 6 Capaian TPT Kab. HSU dibandingkan Provinsi Kalsel dan Nasional	25
Grafik 3. 7 Perbandingan Capaian TPT Kab. HSU dengan Kabupaten tetangga dan Prop.Kalsel Tahun 2023	26
Grafik 3. 8 Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kab. HSU, Provinsi kalsel dan Nasional	27
Grafik 3. 9 Perbandingan capaian indikator Angka Kemiskinan Kab. HSU dengan kabupaten tetangga dan Prop. Kalsel	28
Grafik 3. 10 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten hulu Sungai Utara Tahun 2023 dibanding dengan kabupaten tetangga	36
Grafik 4. 1 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	47
Grafik 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	47
Grafik 4. 3 Petumbuhan Ekonomi Tahun 2023	48
Grafik 4. 4 Tingkat Kemiskinan Tahun 2023	49
Grafik 4. 5 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Tahun 2023	49
Grafik 4. 6 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Tahun 2023	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	2
Gambar 1. 2 Persentase Luas Kabupaten HSU Tahun 2011.....	3
Gambar 3. 1 Peningkatan Perekonomian	23
Gambar 3. 2 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	28
Gambar 3. 3 Peningkatan Pendapatan Masyarakat	29
Gambar 3. 4 Penurunan jumlah kemiskinan	29
Gambar 3. 5 Pelayanan Infrastruktur Dasar	32
Gambar 3. 6 Peresmian Mall Pelayanan Publik.....	33
Gambar 3. 7 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan	35



BAB

I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penetapan kinerjadimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022 adalah acuan bagi penyusunan RKPD sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Sementara itu untuk menyusun RKPD tahun 2023 terkendala dengan ketiadaan dokumen RPJMD yang memuat perencanaan tahun 2023. Hal ini terjadi karena dokumen RPJMD sejalan dengan masa bakti kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mengingat masa bhakti kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan berakhir di bulan Oktober tahun 2022 ini maka dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022 ini juga berakhir periode tahunannya. Seyogyanya pasca pelantikan kepala daerah berikutnya baru dokumen RPJMD ini disusun dengan mengacu kepada visi dan misi kepala daerah yang baru. Kekosongan dokumen RPJMD di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan daerah lainnya tidak terlepas dari pengaruh amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 I-2 Walikota menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan demikian bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 maka akan terjadi kekosongan kepala daerah hingga dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilu kepala daerah tahun 2024. Jadi kepala daerah yang mengisi masa-masa transisi pemilihan kepala daerah baru ini akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi masing-masing daerah. Dalam hal ini untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara akan ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan nantinya. Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah ini bagi daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, maka oleh Kementerian Dalam Negeri diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022”. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri ini diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang salah satunya adalah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026.

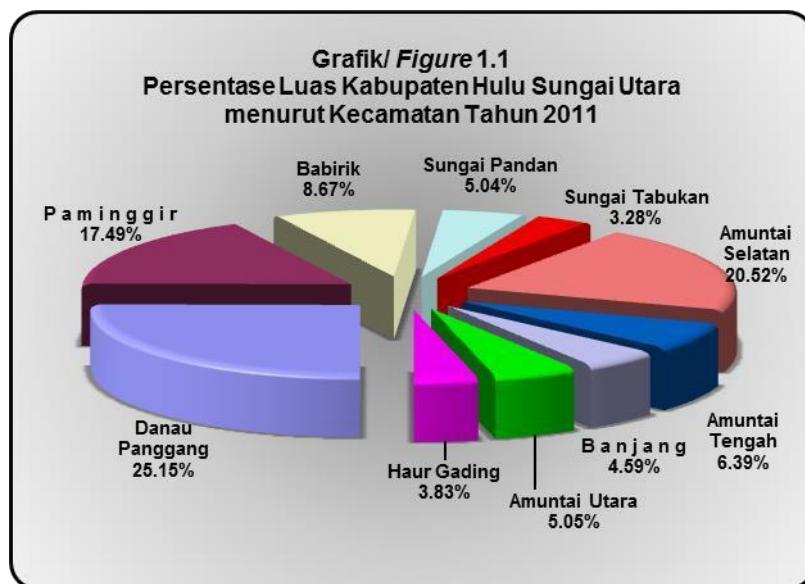
B. ORGANISASI PEMERINTAHAN



Gambar 1. 1 Peta Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai terbagi dalam 10 kecamatan dan terdapat seluruhnya 219 desa dan 5 kelurahan yang ada.



Gambar 1. 2 Persentase Luas Kabupaten HSU Tahun 2011

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang ini.

Bupati Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil yang disebut Wakil Bupati Hulu Sungai Utara dan organisasi pemerintahan yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun daftar Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
6. Dinas Kesehatan;



7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
15. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
19. Dinas Ketahanan Pangan;
20. Dinas Pertanian;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Perpustakaan;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Pendapatan Daerah;
26. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Kecamatan Amuntai Tengah;
30. Kecamatan Amuntai Utara;
31. Kecamatan Amuntai Selatan;
32. Kecamatan Banjang;
33. Kecamatan Haur Gading;
34. Kecamatan Sungai Pandan;
35. Kecamatan Sungai Tabukan;
36. Kecamatan Babirik;
37. Kecamatan Danau Panggang;
38. Kecamatan Paminggir;



BAB

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Sebagaimana ketentuan umum pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan **Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023 – 2026** didasarkan pada **visi dan misi RPJPD Kabupaten**, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025

1. VISI

Visi Daerah untuk perencanaan jangka panjang adalah “**RAWA MAKMUR 2025**”, yang mengandung pemahaman :

“terciptanya kesejahteraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara optimal melalui pemanfaatan dan perekayasaan terhadap berbagai potensi sumberdaya alam/biotik berupa hamparan rawa yang luas; potensi sumberdaya manusia; potensi ekonomi; potensi sosial budaya; potensi ruang dan berbagai potensi yang bersifat lokal lainnya, serta kemampuan dalam memanfaatkan peluang internal dan eksternal sehingga dapat membawa kemakmuran bagi segenap masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Guna mewujudkan Rawa Makmur 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan melalui berbagai MISI yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan visi Rawa Makmur 2025.

2. MISI

Guna mewujudkan Rawa Makmur 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan melalui berbagai MISI yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan visi Rawa Makmur 2025. MISI-MISI ini meliputi :

- a. **Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ**, yakni pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan dan derajad kesehatan yang tinggi, terampil, memiliki kemandirian dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupannya,



memiliki kualitas kehidupan yang baik, serta tetap memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan yang baik dan diimplementasikan sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

- b. **Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas, yakni arah pembangunan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju.** Secara agregat tercipta struktur perekonomian yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi, yang merupakan perwujudan dari transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri).
- c. **Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahan**, dimana arah pembangunan ditujukan untuk menciptakan ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya dalam menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
- d. **Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik**, yakni menciptakan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas, yang ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang profesional, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dapat memberi pelayanan yang maksimal yang disertai penegakkan supremasi hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- e. **Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam** baik berupa sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari dan berkelanjutan serta mewujudkan pengembangan pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang diinginkan dan hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 sampai tahun 2026 dan merupakan kelanjutan dari tujuan-tujuan lima tahun sebelumnya meliputi 6 (enam) tujuan, 8 (delapan) indikator tujuan, 24 (dua puluh empat) sasaran dan 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran.



Tabel 2. 1 Tabel Jumlah Indikator Perkelompok Tujuan dan Sasaran

MISI	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran
Misi 1	1	1	8	12
Misi 2	2	4	8	10
Misi 3	1	1	4	4
Misi 4	1	1	2	4
Misi 5	1	1	4	4
Jumlah	6	8	24	34

Adapun rincian tujuan dan sasaran tersebut yang dibagi berdasarkan Misi-misi yang diemban Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ			
1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Indeks Pembangunan manusia (IPM)	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama Sekolah (Tahun)
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
		3. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		4. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. Usia Harapan Hidup (tahun)
		5. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	5. Indeks Desa Membangun (IDM)
		6. Meningkatnya kontribusi Pemuda dalam	6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			8. Jumlah Perkawinan Anak (orang)
			9. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
			10. Persentase Organisasi Pemuda yang



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Pembangunan	aktif (%)
		7. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	11. Angka Kriminalitas
		8. Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama Yang Harmonis	12. Jumlah Kasus Konflik Sosial
Misi 2 : Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas			
2. Meningkatnya perekonomian daerah	2. Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 3. PDRB Perkapita ADHB (Rp) 4. PDRB Perkapita ADHK (Rp)	9. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	13. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%) 14. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) 15. Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%) 16. Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) 17. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)
		10. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	18. Indeks ketahanan pangan daerah
		11. Meningkatnya sektor pariwisata	19. Persentase Peningkatan Wisatawan (%)
		12. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	20. Rasio Kemandirian Fiskal (%)
		13. Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu Diserap Lapangan Kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3. Menurunnya angka kemiskinan	5. Persentase kemiskinan	14. Penurunan Kemiskinan	22. Persentase kemiskinan (%)
Misi 3 : Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahan			
4. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	f. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	15. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	23. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar
		16. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	24. Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan telekomunikasi



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		17. Meningkatnya Jaringan Interkoneksi Daerah	dan informatika 25. Persentase desa yang terjangkau jaringan internet (4G)
		18. Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	26. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE
Misi 4 : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik			
5. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	g. Indeks Reformasi Birokrasi	19. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	27. Nilai SAKIP Kabupaten 28. Opini BPK 29. Persentase Pencegahan Korupsi (MCP)/ KORSUPGAH
		20. Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN	30. Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN
Misi 5 : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam			
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	21. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		22. Meningkatnya kesesuaian peruntukan lahan	32. Tertib Penataan Ruang
		23. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	33. Indeks Risiko Bencana
		24. Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	34. Indeks Kapasitas Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja juga merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Hulu Sungai Utara tahun 2024, disusun mengacu pada dokumen RPD Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.



Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Perubahannya Tahun 2024, telah disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Indeks	67,26
2.	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	5,14
		PDRB Perkapita ADHB	Rp	20.855,23
		Pengeluaran Perkapita	Rp	9.891,00
	Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20
3.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase kemiskinan	%	6,63
4.	Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks	21-40
5.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,00
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,96

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (APBD) Tahun 2024, yang ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024.
 - b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024.

2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (APBD) tahun 2024 ditetapkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 .
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024. Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	349.667.950.795,00
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah	290.506.917.049,00
3	Menurunnya Angka Kemiskinan	12.166.444.250,00
4	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar	202.205.006.699,00
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik	736.816.114.968,00
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13.607.203.055,00

Sumber : RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026



BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan laporan Akuntabilitas Kinerja yang wajib dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pelaksana kebijakan pembangunan di wilayah kewenangannya. Laporan ini tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan, yaitu sejak perencanaan dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja dan selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dalam tahun anggaran 2024, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja Tahun Kedua dari RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, yang start perencanaannya dimulai tahun 2024 Target tahun kedua RPD ini selanjutnya dituangkan sebagai target kinerja pada RKPD Tahun 2024. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja dari tujuan terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJPD, dan penjelasan atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran pada tahun kedua RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penyempurnaan Indikator RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun capaian kinerja mulai dari tujuan, dan sasaran beserta dengan indikatornya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerjanya digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil (SB)
II	100% ≤ 90%	Berhasil (B)
III	89% ≤ 70%	Cukup Berhasil (CB)
IV	< 70%	Kurang berhasil (KB)

Secara umum realisasi sampai akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori "sangat berhasil" dan "berhasil" masih lebih banyak daripada kategori "cukup berhasil" dan "kurang berhasil".

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target IKU dengan realisasinya. Juga Membandingkan dengan kabupaten tetangga. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Tujuan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,26	71,74	106,67	Sangat Berhasil
Meningkatnya perekonomian daerah						
2.	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	5,14	4,43	86,19	Cukup Berhasil
3.	PDRB Perkapita ADHB	Rp	20.855,23	27.593,23	132,31	Sangat Berhasil
4.	Pengeluaran Perkapita.	Rp	9.891,00	10.981,00	111,02	Sangat Berhasil
Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja						
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20	3,73	111,19	Sangat Berhasil
Menurunnya angka kemiskinan						
6.	Persentase kemiskinan	%	6,63	5,75	113,67	Sangat Berhasil
Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar						
7.	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks	21-40 (sedang)	21-40 (sedang)	100	Berhasil
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik						
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,00	70,14	116,90	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,96	66,5	97,85	Berhasil
Rata – rata					108,37	Sangat Berhasil



Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebesar 108,37% dengan predikat kinerja Sangat Berhasil, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran Utama	Persentasi
1.	Sangat berhasil	6	66,67
2.	Berhasil	2	22,22
3.	Cukup Berhasil	1	11,11
4.	Kurang Berhasil	0	0,00
	Jumlah	9	100

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN

Tujuan 1 : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan menjadikan sumber daya manusia sebagai faktor yang penting dalam menentukan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam persaingan global. Maka oleh sebab itu manusia harus selalu berinovasi untuk memenangkan persaingan ini. kemajuan suatu organisasi hanya dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita pahami bersama-sama mengenai apa itu sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing maka Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Indikator Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana IPM meliputi tiga komponen yaitu komponen Angka Harapan Hidup (AHH), komponen pendidikan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta komponen Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia periode RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 dan Capaian Indeks Pembangunan Manusia



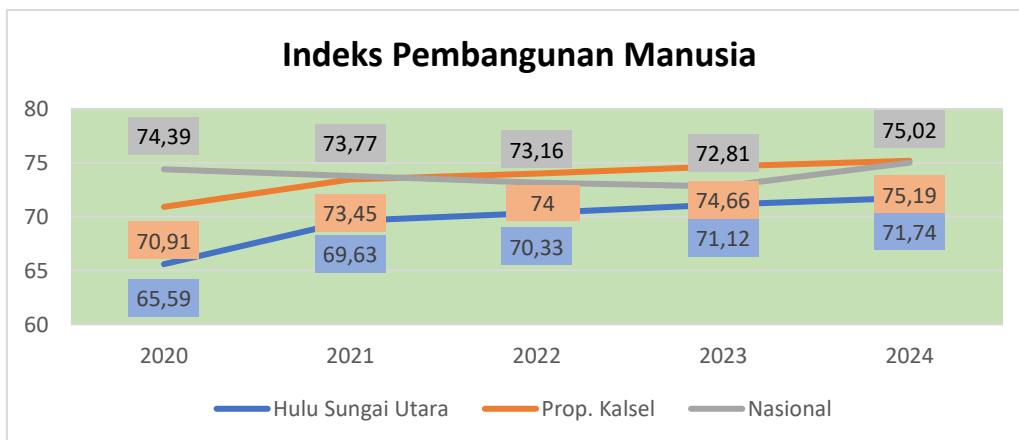
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang merupakan kelanjutan dan tahun kedua RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 1

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2024			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,02	67,26	71,74	106,67	105,47

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2021 – 2023 cukup stabil, hal ini menunjukkan bahwa upaya – upaya yang dilakukan Kabupaten Hulu Sungai Utara baik melalui penyusunan program – program yang mendukung terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia dapat dikatakan sesuai harapan dan sasaran, tetapi melihat dari urutan secara Provinsi yang masih tertinggal, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap program – program yang telah dilaksanakan untuk dapat melakukan intervensi terhadap variabel – variabel dari Indeks Pembangunan Manusia tersebut.

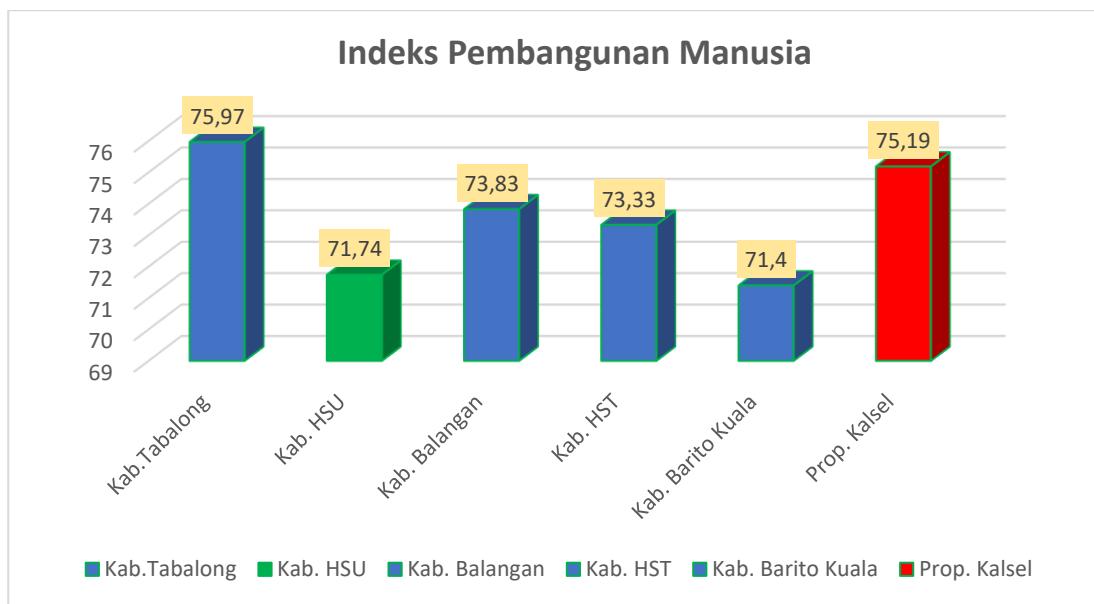
Grafik 3. 1 Capaian IPM Kabupaten HSU Tahun 2020-2024 dibandingkan Provinsi Kalsel dan Nasional



IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Berikut perbandingan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kabupaten tetangga :



Grafik 3. 2 Capaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Jika dibandingkan kabupaten di sekitar Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai IPM cukup tinggi namun kenaikannya hanya sebesar 0,62 dibandingkan dengan tahun 2023 dimana pada tahun 2023 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di atas IPM Kabupaten Balangan dan Kabupaten Barito Kuala, tetapi untuk tahun 2024 posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten sekitar kecuali Kabupaten Barito Kuala. Namun tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk ke dalam kategori “tinggi”, sesuai klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 33 UNDP, dimana tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ($0 \leq \text{IPM} < 60$), kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan kategori sangat tinggi ($80 \leq \text{IPM} \leq 100$).

Upaya – upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan IPM dari bidang pendidikan, kesehatan dan inovasi – inovasi yang sudah dilakukan diantaranya :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan ;
- Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik ;
- Penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan yang mempermudah dan kenyamanan masyarakat untuk berobat;
- Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin pada Puskesmas dan RSUD ;
- Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ;



- Pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak atau kurang mampu.

➊ Tujuan 2 : Meningkatnya perekonomian daerah

Perekonomian daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang diukur atas dasar harga berlaku. Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita ADHB dan Pengeluaran perkapita

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

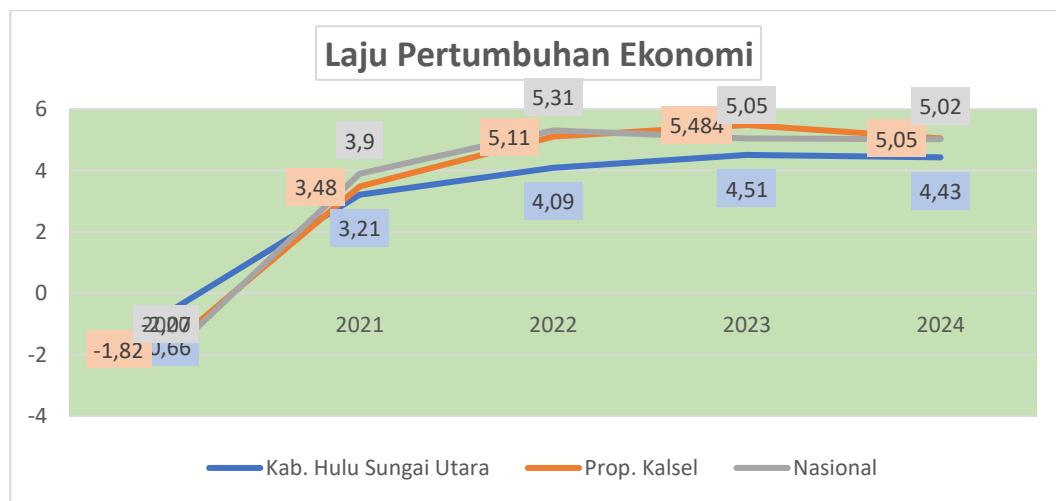
Capaian untuk indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD(2026)	Tahun 2024			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian(%)	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,05	5,14	4,43	86,19	73,32



Grafik 3. 3 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dibandingkan dengan Prop. Kalsel dan Nasional



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara berfluktuasi dan pernah minus pada tahun 2020 karena pengaruh pandemi covid-19. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua kab/kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Perekonomian Kabupaten HSU kembali tumbuh menjadi 4,51% di tahun 2023 namun turun 0,08% di tahun 2024 menjadi hanya sebesar 4,43%.

Berdasarkan tabel Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha, dapat dilihat turunnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dipengaruhi oleh turunnya perentase kontribusi di beberapa sektor. Nilai PDRB Kabupaten HSU atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,87 triliun rupiah, Angka tersebut meningkat dari 1,7 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi laju pertumbuhan ekonomi sekitas 4,51%.

Untuk dapat melihat lebih detailnya Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010 Kabupaten HSU menurut Lapangan Usaha tahun 2020-2022 pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten HSU Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

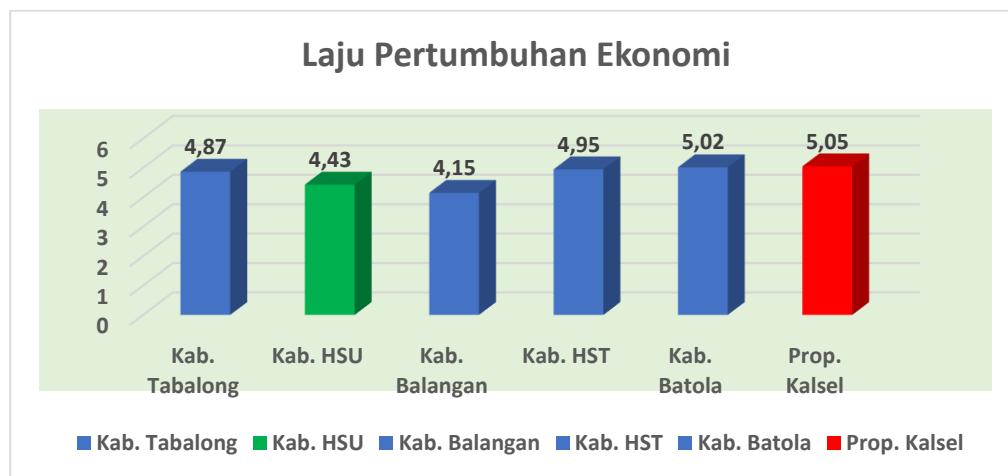
No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,03	5,63	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	4,36	1,09	0,83
C	Industri Pengolahan	3,20	0,72	1,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,48	8,74	7,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,21	5,12	5,06
F	Konstruksi	7,89	4,52	2,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	7,58	5,70	4,86



No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
	Mobil dan Sepeda Motor			
H	Transportasi dan Pergudangan	5,84	4,44	4,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,22	7,05	8,36
J	Informasi dan Komunikasi	6,04	5,52	4,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,69	9,97	6,27
L	Real Estate	6,43	5,61	4,59
M.N	Jasa Perusahaan	6,79	6,68	4,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,68	2,33	6,47
P	Jasa Pendidikan	4,47	3,07	5,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,96	5,25	4,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,60	6,19	6,98
	Produk Domestik Regional Bruto	4,09	4,51	4,43

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 4 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Pada Tahun 2024 sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan. Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di urutan ke 11 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, turun satu peringkat di bandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimiliki oleh kabupaten/kota yang memiliki sektor tambang atau sektor jasa yang sudah berkembang.

2. PDRB perkapita ADHB

Salah satu Indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan



mempengaruhi nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor – faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan membaiknya perekonomian setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada tahun 2022 PDRB perkapita Hulu Sungai Utara mencapai 24,52 juta rupiah.

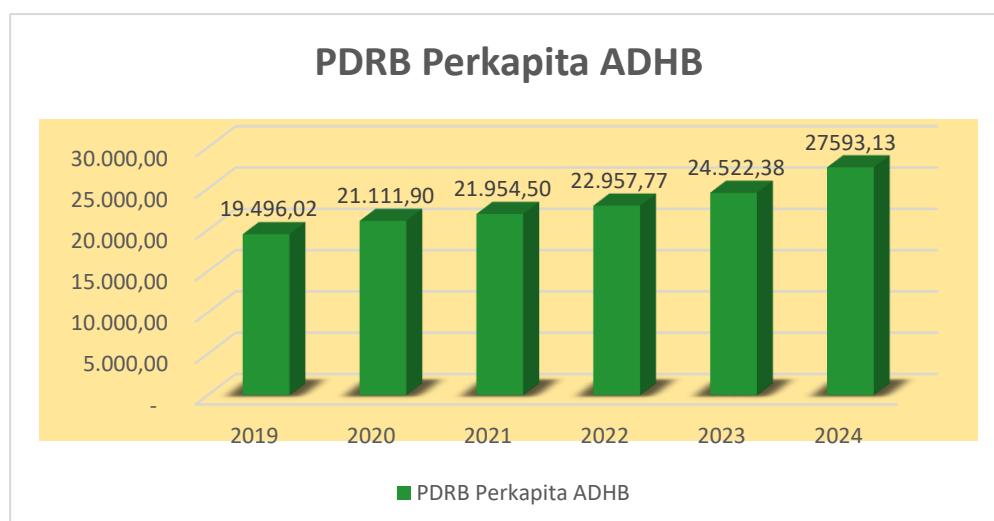
Capaian untuk indikator PDRB perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 3

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2023			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	21.061,71	20.855,23	27.593,13	132,31	131,01

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2024 sudah melebihi dari target capaian tahun 2026 yang merupakan target akhir dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Grafik 3. 4 Capaian PDRB perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa PDRB perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung naik dari tahun ke tahun, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi pertumbuhannya di banding pertumbuhan penduduk



Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 6.612,42 miliar rupiah. Penyumbang terbesar berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 16,46 persen atau setara dengan 1.088,20 miliar rupiah. Kemudian disusul oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,84 persen atau setara dengan 1.047,71 miliar rupiah. Hampir semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Kategori yang pertumbuhannya paling cepat adalah pengadaan listrik dan gas yang mencapai 7,78 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 15,84 %, di susul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,80 %. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 10,15 % dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 9,38 %.

Untuk dapat lebih jelasnya Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2022 -2024 dapat dilhat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,99	16,07	15,84
B	Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,2	0,19
C	Industri Pengolahan	9,22	8,32	8,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	0,83	0,83
F	Konstruksi	10,84	10,75	10,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,57	16,33	16,46
H	Transportasi dan Pergudangan	7,30	7,69	8,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,72	2,74	2,76
J	Informasi dan Komunikasi	4,18	4,16	4,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	3,21	3,21
L	Real Estate	3,53	3,5	3,48
M.N	Jasa Perusahaan	0,42	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,57	11,43	11,80
P	Jasa Pendidikan	9,48	9,22	9,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	2,65	2,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,29	2,36	2,43
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100



3. Pengeluaran perkapita.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pada tahun 2024, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 1.225.868,- rupiah. Pengeluaran rata-rata perkapita makanan sebulan mencapai 661.378 rupiah dan pengeluaran rata-rata perkapita non makanan sebulan mencapai 564.490,- rupiah. Berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita makanan, pengeluaran terbanyak merupakan konsumsi makanan dan minuman jadi, yakni sebanyak 251.699,- rupiah. Sedangkan pengeluaran terkecil pada umbi-umbian sebesar 2.525 rupiah. Sementara itu rata – rata perkapita bukan makanan sebesar 250.940 rupiah digunakan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air. Sedangkan pengeluaran terkecil digunakan untuk keperluan pesta dan upacara sebesar 31.133 rupiah.

Capaian untuk indikator kinerja utama pengeluaran perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 4

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2023			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
4	Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	10.151,00	9.891,00	10.481,00	111,02	108,18

Upaya yang dilakukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan perekonomian diantaranya :

- Peningkatan jalan kabupaten sepanjang 42,028 km untuk pemeliharaan dan 58,058 km untuk yang direhabilitasi sebagai sarana transportasi darat bagi kelancaran perekonomian masyarakat ;
- Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa sepanjang 14 km ;
- Rehabilitasi Jembatan sepanjang 4,104 km sebagai sarana penghubungan antar 2 (dua) wilayah ;



Gambar 3. 1 Peningkatan Perekonomian

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu faktor penting untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan menurunkan atau mengurangi angka pengangguran, berdasarkan hasil Survei



Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2023, sekitar 96,14 persen penduduk angkatan kerja telah bekerja. Sisanya, sekitar 5.021 orang yang masih menganggur. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebesar 577 pekerja. Lebih dari 86 persen yang mencari kerja adalah laki-laki. Dilihat dari tingkat pendidikan, paling banyak pencari kerja tamatan SMA/Sederajat. Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Untuk itulah Tingkat Pengangguran Terbuka dijadikan salah satu Indikator Utama yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 5

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2023			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	3,6	4,20	3,75	114,19	96,39

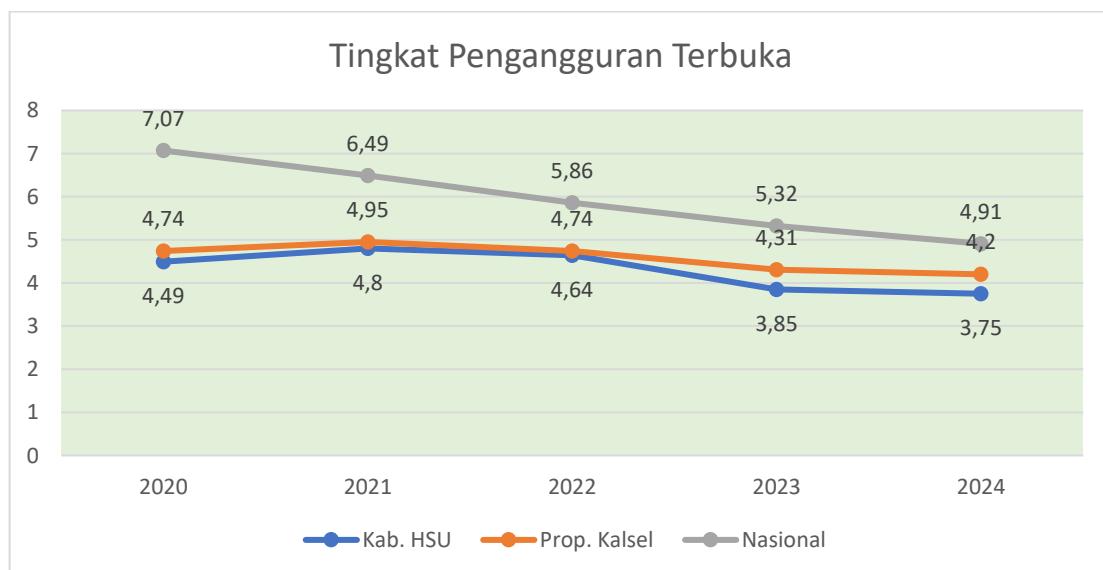
Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak atau masih belum bekerja. Angka 3,75% di tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada Tahun 2024 ialah sebesar 3,75%. Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja ikut meningkat. Maka dari itu, persaingan semakin ketat melihat lapangan kerja yang terbatas. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang kini mengandalkan peralatan canggih, sehingga hanya membutuhkan sedikit pekerja. Selain itu, pekerja harus mempunyai keterampilan supaya tetap dapat bekerja. Selain itu faktor kemiskinan juga mengakibatkan seseorang memiliki keterbatasan



untuk melakukan sesuatu, termasuk mencari ataupun mendaftar pekerjaan. Laju pertumbuhan ekonomi daerah juga berdampak terhadap angka pengangguran karena jika pertumbuhan meningkat maka permintaan barang dan jasa juga meningkat, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Sebagai gambaran, capaian untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 7 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

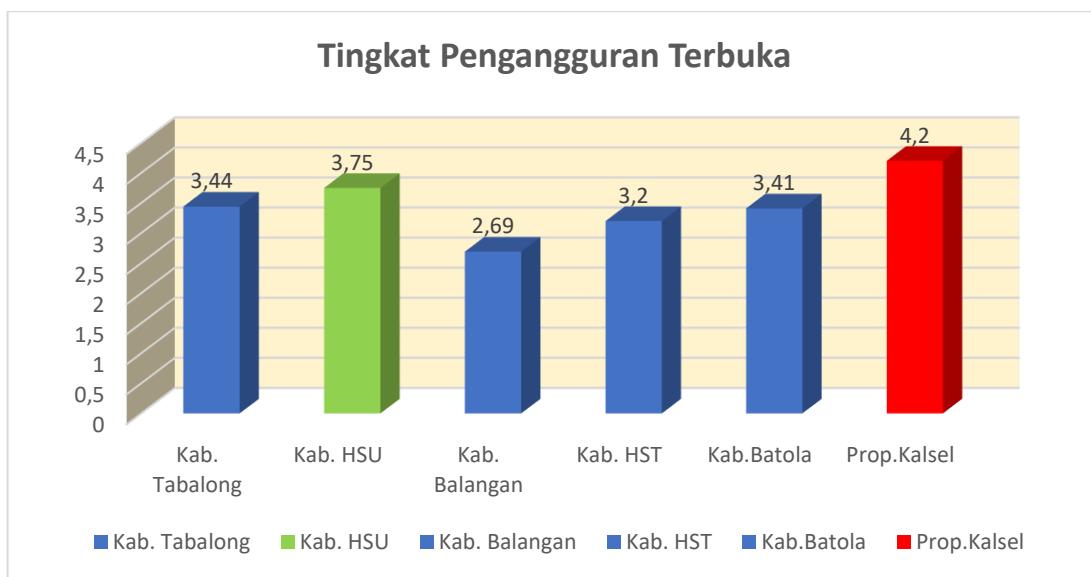
Grafik 3. 5 Capaian TPT Kab. HSU dibandingkan Provinsi Kalsel dan Nasional



Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat berfluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan tingkat pengangguran terbuka nasional dan propinsi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, maka pada Tahun 2024 ada di Peringkat ke 8 terendah dari 13 Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3. 6 Perbandingan Capaian TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Upaya yang dilakukan Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah :

- Memberikan pelatihan – pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja :
- Memberikan pelatihan – pelatihan bagi UMKM untuk peningkatan kapasitas SDM bagi Pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan kemandirian usaha ;



➊ Tujuan 3 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menurunkan Angka



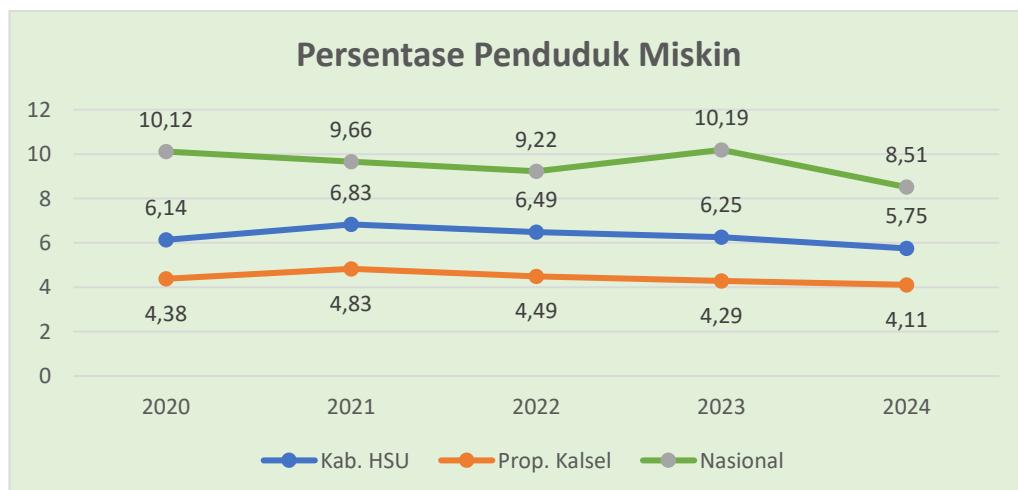
Kemiskinan terus berlanjut, berbagai upaya sudah dilakukan untuk dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten HSU Tahun 2023-2026, angka Kemiskinan selalu menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Capaian yang sudah ditargetkan dari tahun 2020 – 2024 dan perbandingan capaiannya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 6

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2023			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
6	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,43	6,63	5,75	113,27	110,58

Dari tabel diatas dan grafik di bawah ini memberikan gambaran bahwa apa yang sudah diupayakan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan sudah mulai dapat terlihat hasilnya, meskipun di bandingkan dengan kabupaten lain masih tergolong tinggi, namun paling tidak, program – program yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan membawa hasil.

Grafik 3. 7 Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional

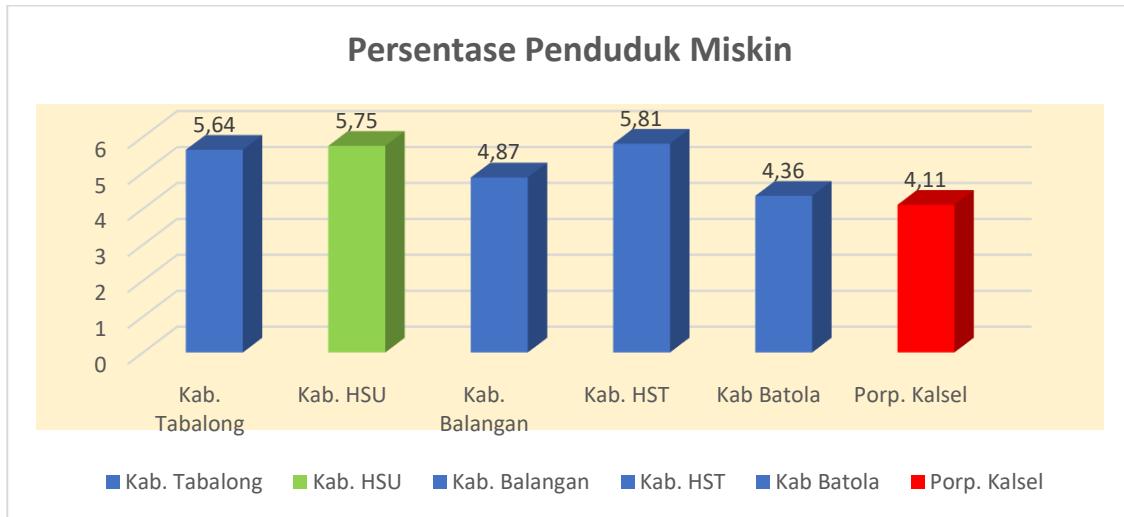


Percentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi daripada Prov. Kalsel, namun masih jauh lebih rendah dari persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 merupakan urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan.



Sedangkan perbandingan capaian Angka Kemiskinan Kabupaten HSU dengan Kabupaten tetangga dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3. 8 Perbandingan capaian indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kabupaten tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terus berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim melalui program dan kegiatan lintas sektoral baik yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan Instansi Sosial Kemasyarakatan, serta pihak swasta.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim antara lain:

1. Pengurangan Beban pengeluaran masyarakat

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui : Program PKH, Bantuan Langsung Tunai (desa), Program indonesia pintar, Program Jaminan Sosial.



Gambar 3. 2 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat



2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan akses pasar, pembinaan kelompok.



Gambar 3. 3 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan insfrastruktur sanitasi air minum layak, seperti Rehab Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSLH).



Gambar 3. 4 Penurunan jumlah kemiskinan

Pada tahun 2024, sebanyak 157 unit rumah mendapat bantuan sosial peningkatan rumah tidak layak huni yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan insfrastruktur sanitasi air minum layak, seperti Rehab Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSLH).



4. Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah adalah program yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui Bulog berupa pemberian beras kepada Masyarakat miskin yang terdata dalam P3KE Kemenko PMK.

Inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan kemiskinan antara lain :

1. Infaq rutin dari ASN setiap bulan dan Infaq sukarela dari ASN pada saat apel gabungan di minggu pertama setiap bulannya;

Hasil infak disalurkan BAZNAS melalui program :

- a. Hulu Sungai Utara Makmur, berupa modal usaha, pendampingan usaha;
- b. Hulu Sungai Utara Cerdas, berupa beasiswa, pendampingan beasiswa, sarana pendidikan;
- c. Hulu Sungai Utara Sehat, berupa bantuan biaya berobat;
- d. Hulu Sungai Utara Peduli, berupa paket Ramadhan, bantuan bencana kebakaran, banjir dll;
- e. Hulu Sungai Utara Taqwa, berupa bantuan sarana keagamaan, bantuan bagi mualaf.

2. Bidang Pendidikan :

- a. Bantuan beasiswa untuk siswa miskin;
- b. Bantuan transportasi berupa sepeda untuk anak yang jarak rumahnya jauh dari sekolah.
- c. Bantuan Pakaian sekolah dan perangkat sekolah untuk siswa sekolah dasar..

➊ Tujuan 4 : Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar

Pelayanan Infrastruktur Dasar adalah merupakan pelayanan minimal pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur bagi masyarakat sebagai tolak ukur kemakmuran suatu daerah diantaranya pembangunan jalan sampai ke daerah terpencil sebagai akses perekonomian masyarakat, akses listrik, akses internet, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata.

Capaian dan target dari Indeks Infrastruktur Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang merupakan tahun ke-dua periode RPD Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 12 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 7

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2024			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
7	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	-	61-80 (baik)	21-40 (sedang)	21-40 (sedang)	173,60	86,79

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Indeks Infrastruktur Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 69,438, sudah berada diatas 50, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik, memang masih ada beberapa kekurangan terutama pada akses jalan di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kondisi wilayah yang terdiri dari 89% rawa dan sungai, sehingga untuk akses jalan masih belum bisa 100% dapat dilalui dengan kendaraan roda 2 dan roda 4, masih ada beberapa wilayah yang diakses dengan menggunakan perahu motor karena wilayahnya yang dikelilingi oleh sungai.



Pembangunan Jalan



Pembangunan Dermaga Angkutan Sungai



Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum



Pembangunan RSUD Baru

Gambar 3. 5 Pelayanan Infrastruktur Dasar

➊ Tujuan 5 : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Atas dasar inilah Indeks Reformasi Birokrasi dijadikan Indikator Kenerja Utama Pemerintan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Tabel 3. 13 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 8

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2023			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	70 (B)	60,00	70,14	116,90	100,20



Gambar 3. 6 Peresmian Mall Pelayanan Publik

Upaya perbaikan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan konsultasi dan koordinasi serta pendampingan dengan KEMENPAN-RB;
- 2) Mengikuti Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- 3) Menyusun Rencana Aksi yang memfokuskan pada Rekomendasi Hasil Evaluasi ;
- 4) Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Indikator – indikator RB General dan RB Tematik;

❖ Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas Lingkungan Hidup dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Karena itu Kualitas Lingkungan Hidup menjadi ukuran yang penting bagi suatu daerah. Untuk menjaga Kualitas Lingkungan Hidup dengan kondisi baik diperlukan daya dukung lingkungan Capaian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 9

No.	IKU	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2023			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,08	67,96	66,50	97,85	97,82

Dari tabel target dan capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian dari indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 97,85%, dimana Indeks dari Kualitas Lingkungan Hidup mencapai pada angka 66,50, hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berkualitas sedang dimana kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong sedang, karena tingkat pencemaran air masih sedang. Pencemaran air ini lebih dipengaruhi oleh aliran sungai dari hulu akibat adanya pertambangan karena wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara cekungan yang didominasi rawa dan merupakan tempat berkumpulnya aliran air dari wilayah balangan dan Tabalong.

Upaya perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup diantaranya :

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam secara berkelanjutan;67,96
- 2) Perbaikan kualitas air melalui pengawasan izin pembuangan limbah cair ke badan air, menurunkan jamban-jamban apung dan pembersihan sampah di badan sungai;
- 3) Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa pengganti jamban apung;
- 4) Perbaikan kualitas udara melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengawasan izin emisi pada perusahaan dan atau buangan kendaraan bermotor



Gambar 3. 7 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan

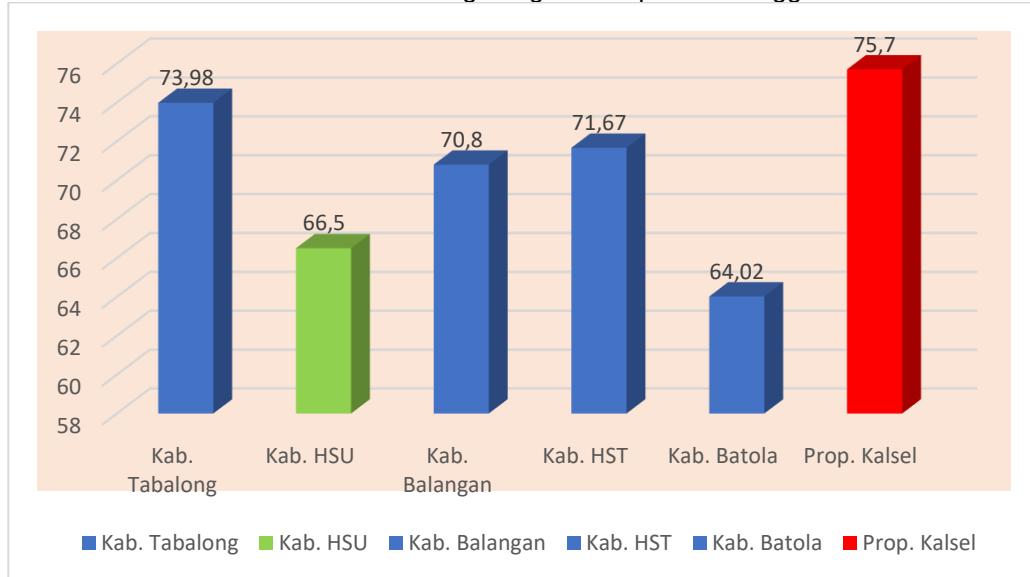


Gambar 3.8 Pemasangan alat pemantauan kualitas udara
metode passive sampler di lokasi pemantauan Simpang Empat Banua Lima



Gambar 3.9 Pemantauan kualitas air Sungai Tabalong

Grafik 3.9 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten hulu Sungai Utara Tahun 2024 dibanding dengan kabupaten tetangga



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2024, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 15 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024
(Sebelum Audit BPK RI)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pendapatan Daerah	1,602,421,302,841.00	1,824,754,822,892.62	113.89
1.1	Pendapatan Asli Daerah	151,552,203,799.00	153,658,896,659.62	101.39
1.2	Pendapatan Transfer	1,450,239,099,042.00	1,670,488,447,621.00	115.19
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	450.000.000.00	607,478.612.00	135.00
2	Belanja Daerah	1,743,733,685,992.00	1,529,454,753,214.00	87.71
2.1	Belanja Operasi	1,142,989,657,487.00	981,450,856,384.00	85.87
2.2	Belanja Modal	335,329,547,386.00	289,868,982,230.00	86.44
2.3	Belanja Tidak Terduga	7.653.066.519.00	373,500,000.00	4.88
2.4	Belanja Transfer	257,761,414.600.00	257,761,414.600.00	100.00
3	Pembiayaan Daerah	141,492,383,151.00	141,492,383,151.00	100.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	255,697,804,806.00	255,697,804,806.00	100.00
3.1.1	Penggunaan SiLPA	255,694,804,806.00	320,442,330,243.34	100.00
3.1.2	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	114,205,421,655.00	114,205,421,655.00	100.00
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	20,500,055,526.00	20,500,055,526.00	100.00
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	93,705,366,129.00	93,705,366,129.00	100.00
	Pembiayaan Netto	141,492,383,151.00	141,492,383,151.00	100.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	436,789,452,829.92	0.00

Sumber : LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Adapun Pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian terget tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	326.891.956.932,00	294.117.996.450,00	89,97
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah	291.801.703.727,00	279.488.772.059,00	95,78
3	Menciptakan Tenaga Kerja Produktif Yang Siap dan Mampu Diserap Lapangan Kerja	737.040.500,00	534.042.890,00	72,46
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6.446.496.870,00	5.182.462.000,00	80,39
5	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar	263.961.006.475,00	217.661.973.032,00	82,46
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik	835.386.982.186,00	717.573.667.246,00	85,90
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	12.392.425.765,00	9.175.439.543,00	74,04

Sumber : RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 dan LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

2. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja utama tujuan yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat diketahui dari capaian kinerja tujuan dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut:



Tabel 3. 17 Efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capain Kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	(%)
MISI 1. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ					
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing - <i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	1	106,66	294.117.996.450,00	89,97
MISI 2. Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas					
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah - <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i> - <i>PDRB Perkapita ADHB</i> - <i>Pengeluaran Perkapita</i>	3	110,32 87,72 132,31 111,02	279.488.7724.059,00	95,72
3	Menciptakan Tenaga Kerja Produktif Yang Siap dan Mampu Diserap Lapangan Kerja - <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	1	111,19	534.042.890,00	72,46
4	Menurunnya Angka Kemiskinan - <i>Persentase Kemiskinan</i>	1	102,54	5.182.462.000,00	80,39
MISI 3. Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahana					
5	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar - <i>Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar</i>	1	100	217.661.973.032,00	82,46
MISI 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik					
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik	1	116,90	717.573.667.246,00	85,97



	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>				
MISI 5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam					
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup - <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	1	100,96	9.175.439.543,00	74.04

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024

Dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari table data yang disajikan dalam table tersebut diatas terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja utama. Dari 7 (tujuh) tujuan/sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama, terdapat 8 (delapan) kinerja utama yang melebihi 100%. Dengan banyaknya tujuan/kinerja utama yang berhasil dicapai dengan sumberdaya yang efisien, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya anggaran dalam mencapai tujuan/kinerja utama sangat baik.

Tabel 3. 18 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase Realiasi Anggaran	Tingkat Efisiesnsi
MISI 1. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ					
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing - <i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	1	106,66	89,97	10,97
MISI 2. Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas					
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah - <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i> - <i>PDRB Perkapita ADHB</i>	3	110,32 87,72 132,31	95,72	4,28



	- <i>Pengeluaran Perkapita</i>	1	111,02		
3	Menciptakan Tenaga Kerja Produktif Yang Siap dan Mampu Diserap Lapangan Kerja - <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	1	111,19	72,46	27,54
4	Menurunnya Angka Kemiskinan - <i>Persentase Kemiskinan</i>	1	102,54	80,39	19,61
MISI 3. Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahana					
5	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar - <i>Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar</i>	1	100	82,46	17,54
MISI 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik					
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik - <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	1	116,97	85,97	14,03
MISI 5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam					
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup - <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	1	100,96	74,04	25,96

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan predikat kinerja sangat berhasil yang terlihat dari capaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Tingkat Pengangguran Terbuka.



Capaian pada indeks kualitas lingkungan hidup cukup tinggi dipengaruhi oleh cukup tingginya peran serta masyarakat dan pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti rencana aksi jumat bersih dan pengelolaan limbah.

Sedangkan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka sangat tinggi, hal ini didorong oleh kerjasama dengan dunia usaha baik yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Luar Kabupaten, serta angkatan kerja yang telah dilatih telah bekerja dana tau mampu melakukan kegiatan wirausaha.

Selain itu dari sisi penggunaan anggaran terdapat satu tujuan dengan tiga indikator yang menunjukkan efisiensi anggarannya kecil yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah, hal ini menunjukkan dari segi penyerapan anggaran cukup tinggi atau anggaran yang disediakan seluruhnya direalisasikan. Dari capaian indikator kinerja terdapat satu indikator yang tidak tercapai yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, ketidak ketercapaian kinerja ini juga cukup dipengaruhi faktor eksternal yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah.

3. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tertinggi pada Tujuan/Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi atas komponen RB general dan tematik, dapat diuraikan bahwa dukungan program dan kegiatan utama.

Adapun kegiatan utama dan indikator pencapaian indeks RB General Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:.

No	Kegiatan Utama	Indikator
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile;	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;	Indeks SPBE



No	Kegiatan Utama	Indikator
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;	Nilai SAKIP
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);	Tingkat Maturitas SPIP
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;	Survei Penilaian Integritas
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;	Indeks Kualitas Kebijakan
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;	Indeks Reformasi Hukum
12.	Pelaksanaan Arsip Digital;	Tingkat Digitalisasi Arsip
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;	Indeks Pembangunan Statistik
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;	Indeks Tata Kelola Pengadaan
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;	Opini BPK
		Tindak Lanjut Rekomendasi
16.	Penguatan Sistem Merit;	Indeks Sistem Merit
17.	Pelaksanaan Core Values ASN;	Indeks BerAKHLAK
18.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima;	Indeks Pelayanan Publik



No	Kegiatan Utama	Indikator
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Sedangkan sasaran Tematik dan indikator RB tematik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut:

No	Sasaran Tematik	Indikator
1.	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
2.	Pertumbuhan investasi	Nilai Realisasi PMA dan PMDN
3.	Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi
4	Penurunan Angka Stunting	Angka Stunting
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Persentase Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa

Dari capaian indikator kegiatan utama RB General dan Tematik secara keseluruhan telah mencapai standar baik berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 182 Tahun 2024, meskipun masih terdapat indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan karena masih dibawah standar baik.

4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tahun 2024, dengan nilai pengadaan melalui tender, non tender dan e-purchasing sebesar Rp.472.240.922.331,00 dengan nilai realisasi kontrak sebesar Rp.381.147.486.671,00, terdapat efisiensi sebesar Rp.91.093.435.660,00 atau 19,29%.

Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui transaksi e-purchasing dari pagu sebesar Rp.269.140.982.028,00, realisasi transaksi sebesar Rp.194.072.988.839,00, efisiensi sebesar Rp.75.067.993.189,00 atau sebesar 27,89%. Adapun rincian realisasi transaksi e-purchasing yaitu e-katalog sebesar Rp.193.610.988.839,00 dan toko daring sebesar Rp. 462.000.000.



BAB

IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Tingkat capaian terhadap indikator kinerja utama RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama, rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 adalah sebesar **113,78%** dengan predikat kinerja “**Sangat Berhasil**”.

Adapun rincian pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Tujuan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,26	71,74	106,67	Sangat Berhasil
Meningkatnya perekonomian daerah						
2.	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	5,14	4,43	86,19	Cukup Berhasil
3.	PDRB Perkapita ADHB	Rp	20.855,23	27.593,23	132,31	Sangat Berhasil
4.	Pengeluaran Perkapita.	Rp	9.891,00	10.981,00	111,02	Sangat Berhasil
Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja						
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20	3,73	111,19	Sangat Berhasil
Menurunnya angka kemiskinan						
6.	Persentase kemiskinan	%	6,63	5,75	113,67	Sangat Berhasil
Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar						
7.	Indeks	Indeks	21-40	21-40	100	Berhasil



No.	Tujuan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
	Pelayanan Infrastruktur Dasar		(sedang)	(sedang)		
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik						
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,00	70,14	116,90	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,96	66,5	97,85	Berhasil
Rata – rata					108,37	Sangat Berhasil

Sesuai tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Nilai rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sebesar 108,37% dengan predikat Sangat Berhasil.
- 2) 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (66,67%) tercapai dengan kategori “Sangat Berhasil”.
- 3) 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (22,22%) tercapai dengan kategori “Berhasil”.
- 4) 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (11,11%) tercapai dengan kategori "Cukup Berhasil" Berkenaan dengan indikator kinerja utama yang belum mencapai target, terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilaksanakan guna pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya. Upaya perbaikan tersebut diantaranya :
 - 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - 2) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KEMENPAN-RB;
 - 3) Mengikuti Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 - 4) Menyusun Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
 - 5) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
 - 6) Perbaikan kualitas air melalui pengawasan izin pembuangan limbah cair ke badan air, menurunkan jamban-jamban apung dan pembersihan sampah di badan sungai;
 - 7) Perbaikan kualitas udara melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengawasan izin emisi pada perusahaan dan atau buangan kendaraan bermotor.



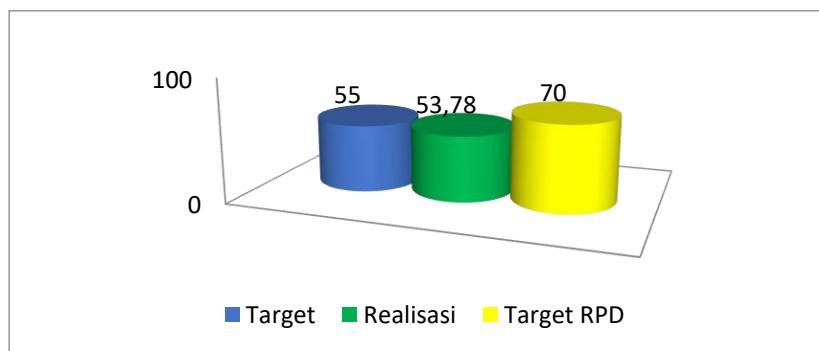
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 diselesaikan melalui MISI ke-4 pada RPJPD : **Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan tujuan “terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik” dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 55, realisasi 53,78 dan target akhir RPD 70.

Adapun grafik progres penyelesaian isu tersebut, sebagai berikut :

Grafik 4. 1 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

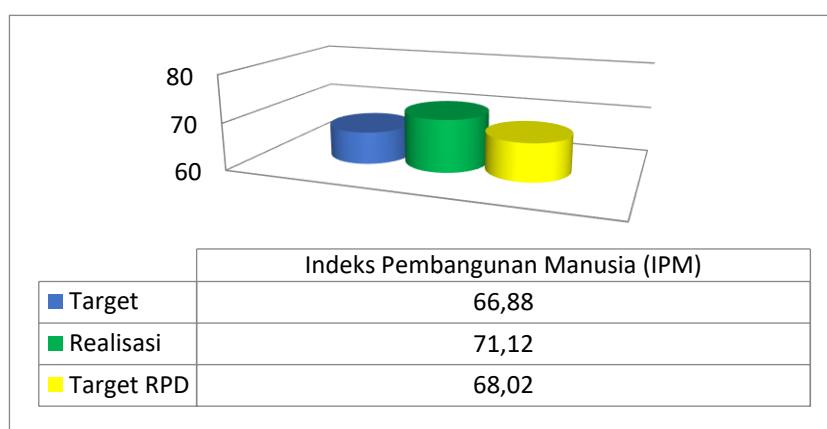


2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Belum optimalnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 diselesaikan melalui MISI ke-1 pada RPJPD : **Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ**, dengan tujuan “Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Target 66,88, realisasi 71,12 dan target akhir RPD 68,02.

Adapun grafik progres penyelesaian isu tersebut, sebagai berikut :

Grafik 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 20

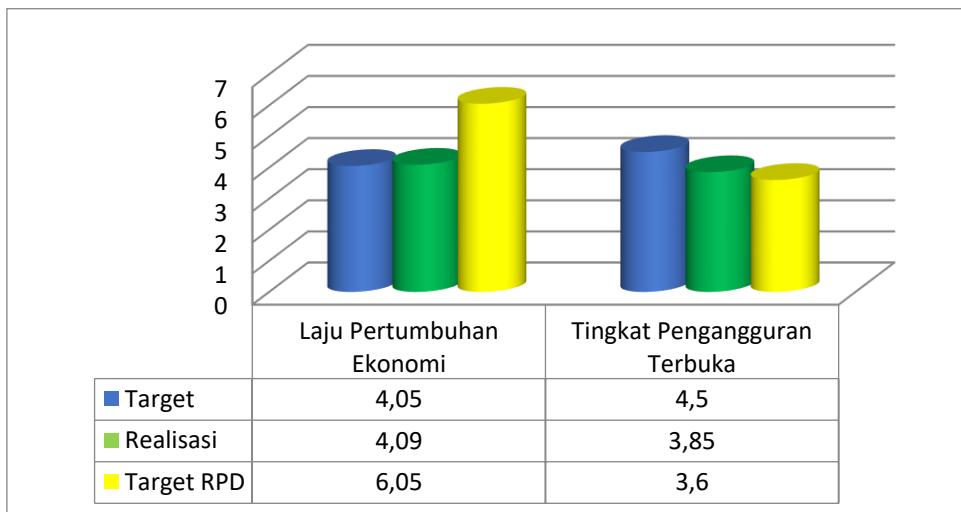
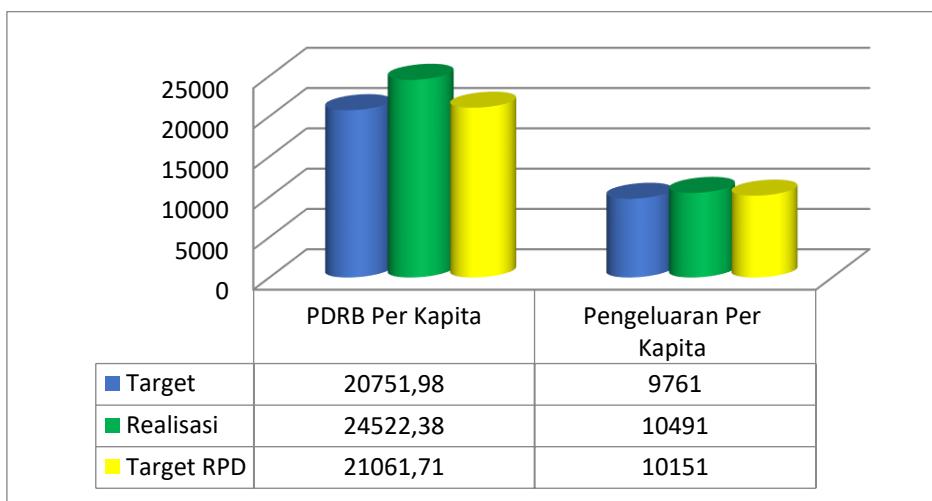




3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 diselesaikan melalui MISI ke-2 pada RPJPD : **Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas**, dengan tujuan ke-2 “Meningkatnya Perekonomian Daerah”, dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu Laju pertumbuhan ekonomi dengan Target 4,05, realisasi 4,09 dan target akhir RPD 6,05. Indikator PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp) dengan Target 20.751,98, realisasi 20.855,23 dan target akhir RPD 21.061,71. Indikator Pengeluaran Perkapita (Juta Rp) dengan Target 9.644,00, realisasi 9.761,00 dan target akhir RPD 10.151,00. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dengan Target 4,5, realisasi 3,85 dan target akhir RPD 3,6. Adapun grafik progres penyelesaian isu tersebut, sebagai berikut :

Grafik 4. 3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023



4. Penanggulangan Kemiskinan Daerah

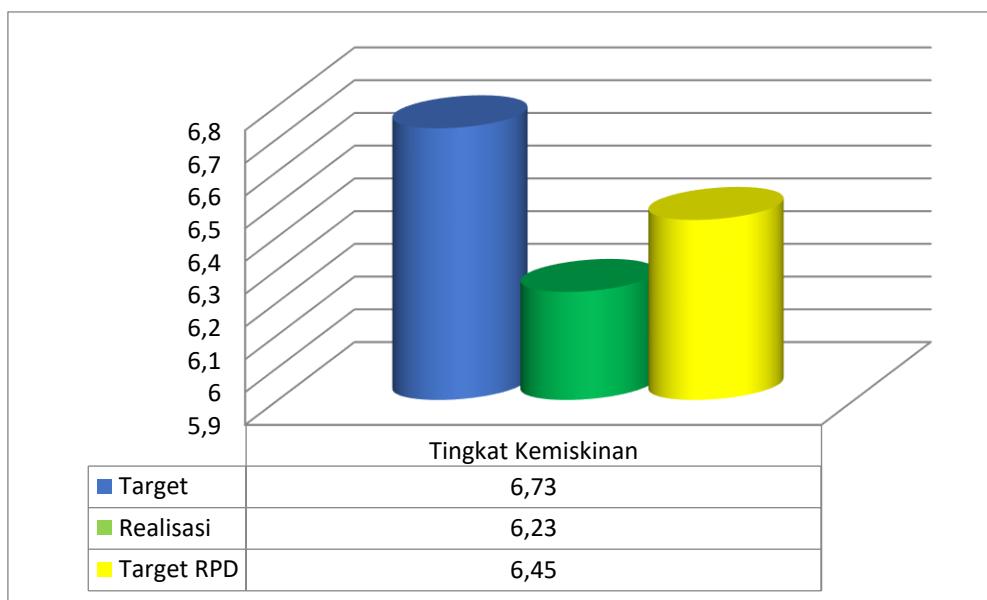
Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Hulu Sungai



Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 diselesaikan melalui MISI ke-2 pada RPJPD : **Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas**, dengan tujuan “Menurunnya angka kemiskinan” dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase kemiskinan dengan Target 6,73, realisasi 6,23 dan target akhir RPD 6,43.

Adapun grafik progres penyelesaian isu tersebut, sebagai berikut :

Grafik 4. 4 Tingkat Kemiskinan Tahun 2023

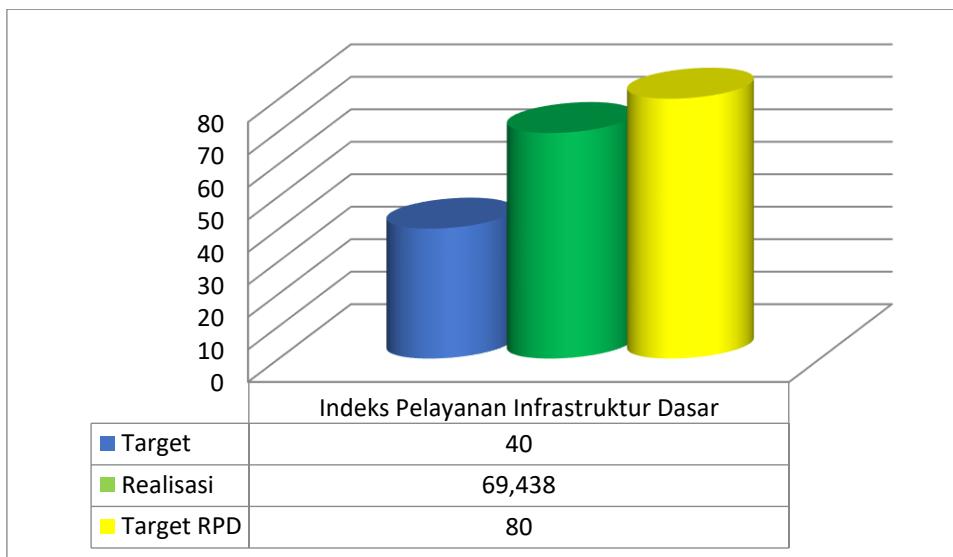


5. Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum

Belum optimalnya infrastruktur dasar dan pelayanan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 diselesaikan melalui MISI ke-3 pada RPJPD : **Pengembangan Prasarana dan sarana fisik kewilayaahan**, dengan tujuan “Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar”, dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks pelayanan infrastruktur dasar dengan Target 21-40, realisasi 69,438 dan target akhir RPD 61-80.

Adapun grafik progres penyelesaian isu tersebut, sebagai berikut :

Grafik 4. 5 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Tahun 2023

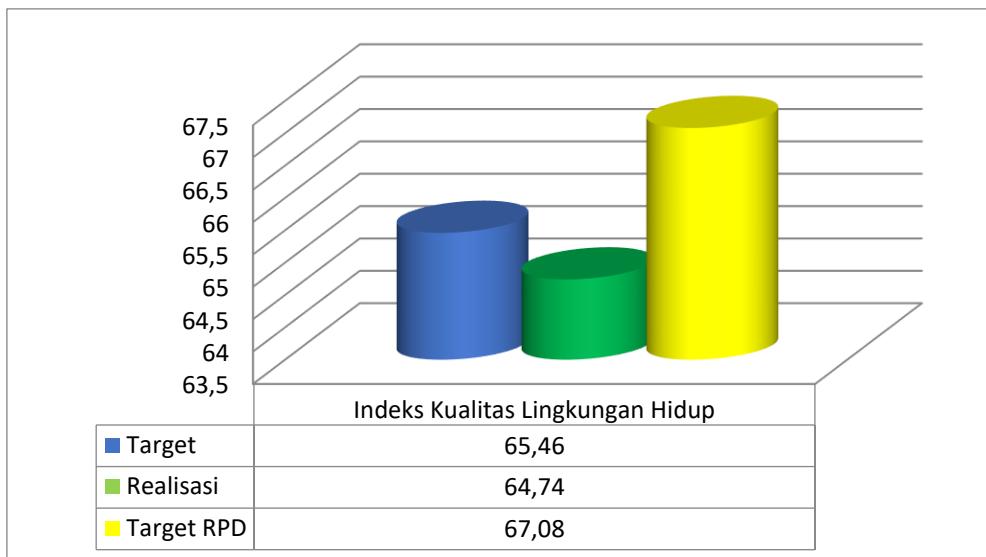


6. Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Kebencanaan

Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 diselesaikan melalui MISI ke-5 pada RPJPD : **Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam**, dengan tujuan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks kualitas lingkungan hidup dengan Target 65,46, realisasi 64,74 dan target akhir RPD 67,08.

Adapun grafik progres penyelesaian isu tersebut, sebagai berikut :

Grafik 4. 6 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Tahun 2023



Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam merupakan kontribusi dari berbagai pihak baik pimpinan, aparat pemerintah dan pihak lain seperti swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pembangunan



di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga sinergi seluruh elemen masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sehingga penting untuk dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan dalam capaian kinerja pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, LkjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan tentang apa yang telah dilakukan dan yang harus dilakukan pada masa mendatang, sehingga pembangunan terus berkelanjutan, sesuai arah yang telah ditentukan. Masukan dan saran menjadi penting untuk perbaikan yang akan datang.



LAMPIRAN



DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN 2023















